

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2024). *Realisasi pendapatan negara tahun 2019-2023*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kinerja APBN 2023 Luar Biasa, Capai Target Lebih Cepat dan Sehatkan Ekonomi Nasional*. 2024.
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531>
- LAPENKOP JATIM. (2021). Kelebihan Dan Kekurangan Koperasi. *Lembaga Pendidikan Perkoperasian Wilayah Jawa Timur*, 1.
<https://lapenkopjatim.com/kelebihan-dan-kekurangan-koperasi/>
- Peraturan Pemerintah No 55. (2022). Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. *Republik Indonesia*, 160030.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 17. (2012). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. *Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, 12(November), 1–68. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Wijaya, V. S., & Yanti, L. D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss*, 6(1), 206–216.
<https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.611>